



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM JAWA BARAT



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020.

Sesuai dinamika perkembangan yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1. LATAR BELAKANG	3
1.1.1 Tugas Dan Fungsi.....	5
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
1.2.1. Bagan Organisasi	6
1.2.2. Pemetaan Pegawai.....	6
1.3. ISU STRATEGIS/PERMASALAN.....	8
BAB II PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA	30
2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA.....	30
2.2. PERENCANAAN KINERJA	32
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	37
3.1.1. Perbandingan Nilai E-Performance Tahun 2019 & 2020	37
3.1.2. Target Kinerja	43
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	49
BAB IV PENUTUP.....	51



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang biasa disebut *good governance* dalam suatu negara merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pemerintah wajib menerapkan kaidah-kaidah yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip *good governance*. Salah satu perwujudan *Good Governance*, pemerintah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Hal ini disebabkan karena akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *good Governance*. *United Nations Development Program* (UNDP) mengajukan sembilan karakteristik *good governance* yang salah satunya adalah *accountability* (akuntabilitas). Ditambah lagi prinsip akuntabilitas juga merupakan salah satu dari tujuh asas penerapan *good governance* dalam acuan umum penerapan *good governance* pada sector publik oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya *good governance*, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang saat ini diganti mmenjadi Laporan Kinerja. Laporan Kinerja merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjadi salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah berdasarkan rencana strategis. Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain :

1. Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.
3. Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik
4. Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
7. Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Berdasarkan 8 (delapan) sasaran tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2020.

1.1.1 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah dan dibantu oleh para Kepala Divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi dengan berdasarkan dari kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI yaitu perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah , pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Bidang Masyarakat;
5. Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

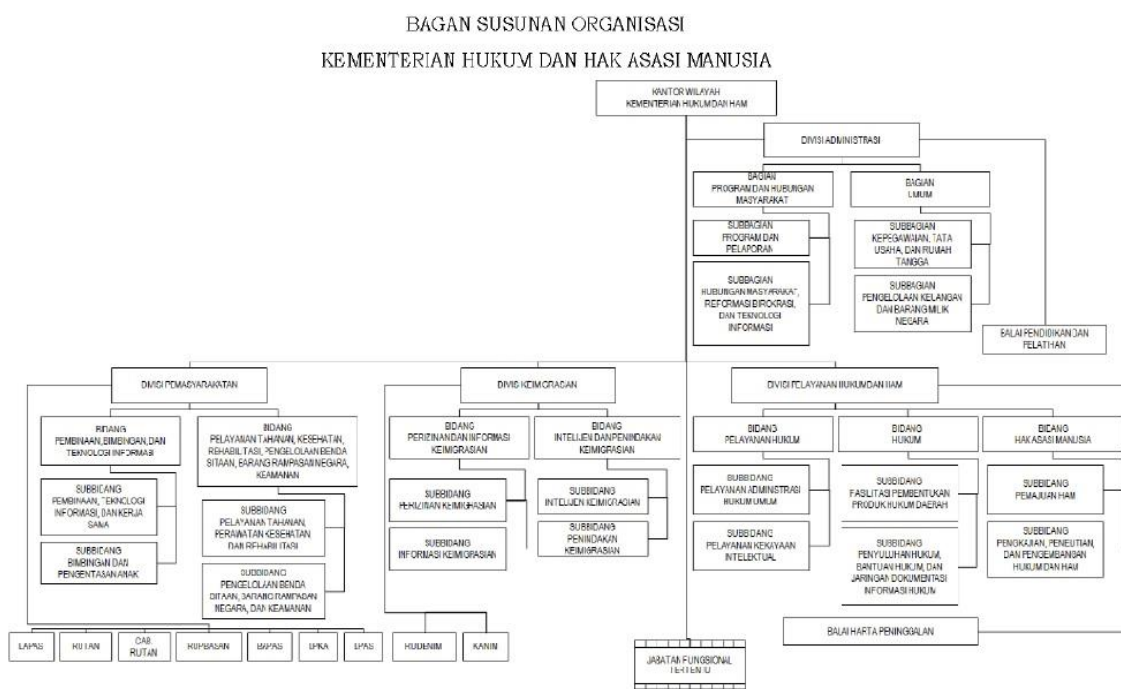
Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



1.2. STRUKTUR ORGANISASI

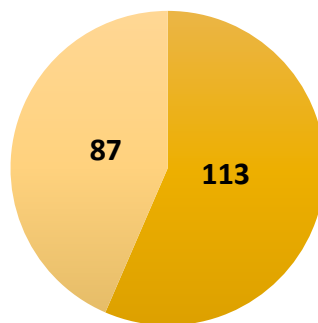
1.2.1. Bagan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, dijelaskan sebagai berikut :



1.2.2. Pemetaan Pegawai

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



■ LAKI - LAKI ■ PEREMPUAN



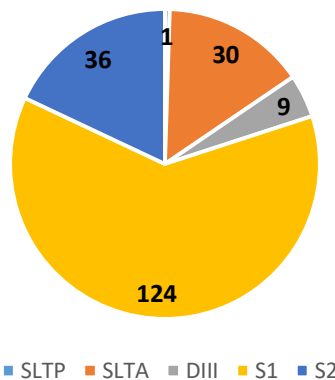
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



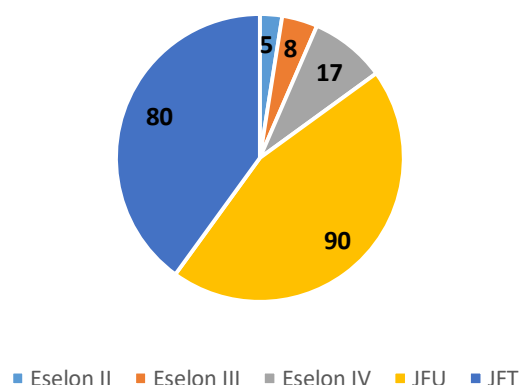
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa jumlah pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat sebanyak 200 pegawai dengan jenis kelamin pria sebanyak 113 orang dan perempuan sebanyak 87 orang.

**Jenjang Pendidikan Pegawai
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat**



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari 200 pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, terdapat 1 orang dengan jenjang pendidikan SMP, 30 orang SLTA/SMA, 9 orang DIII, 124 orang S1 dan 36 orang S2.

**Jenjang Jabatan Pegawai
Kanwil Kemenkumham Jawa Barat**



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dari 200 pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, terdapat 5 orang dengan jabatan eselon II, 8 orang eselon III, 17 orang eselon IV, 80 orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) dan 90 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU). Adapun Jabatan Fungsional Tertentu



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



(JFT) terbagi menjadi JFT Perancang Perundang-Undangan, JFT Penyuluh Hukum, JFT Barang dan Jasa, dan JFT Pranata Komputer.

1.3. ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, terdapat beberapa kendala/permasalahan yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak optimalnya kinerja. Berikut permasalahan yang dihadapi :

1. Terdapat indikasi tumpang tindih/duplikasi tugas dan fungsi, seperti diantaranya terdapat nomenklatur Teknologi Informasi pada Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi pada Divisi Administrasi, yang mana nomenklatur tersebut juga terdapat pada Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja sama pada Divisi Pemasyarakatan. Contoh lainnya adalah pada Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga yang mencakup tugas pelaksanaan rumah tangga termasuk di dalamnya penyediaan barang persediaan konsumsi dan pengelolaan penggunaan ruangan. Tugas tersebut tumpang tindih dengan tugas pengelolaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan oleh Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
2. Ketidakselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam hal ini, kerap kali terjadi dimana suatu kegiatan yang seharusnya ditangani oleh Divisi Teknis namun secara penuh diatur oleh Divisi Fasilitatif, yang mana seharusnya berfungsi hanya sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan. Atau sebaliknya, pada kegiatan yang perlu melibatkan Divisi Fasilitatif sepenuhnya diatur oleh Divisi Teknis. Contoh lainnya adalah urusan terkait Keprotokolan yang dipandang lebih selaras untuk dilaksanakan oleh Bagian Umum karena berkaitan dengan persiapan dan pengelolaan suatu kegiatan formal yang meliputi Tata Tempat, Tata Acara, serta hal-hal lainnya.
3. Beban kerja yang tidak proporsional, dimana pada beberapa sektor kerja terdapat beban kerja yang timpang, terutama jika dibandingkan dengan kekuatan SDM yang tersedia. Salah satunya adalah area kerja Reformasi Birokrasi pada



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



Subbagian Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi mencakup area kerja yang luas seperti Pembangunan Zona Integritas, SPIP, Pengaduan, serta pelaksanaan RB itu sendiri.

4. Wilayah kerja yang luas yang kerap kali berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat baik internal Kementerian Hukum dan HAM maupun eksternal dari para *stakeholders*. Di samping itu, pelaksanaan pemantauan dan pengawasan atas penyelenggaraan kinerja dan layanan juga kurang efektif dan efisien mengingat jumlah Unit Pelaksana Teknis yang diampu cukup banyak dan tersebar se-Jawa Barat. Terlebih di tengah Pandemi COVID-19 saat ini, maka semakin menghambat pelaksanaan kegiatan koordinasi maupun pengawasan.

Adapun pada masing-masing subbidang/subbagian memiliki kendala dalam menjalankan tugas dan fungsi, berikut matriks pada masing-masing subbidang/subbagian beserta solusi terhadap kendala yang dialami dalam menjalankan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat ;

DIVISI ADMINISTRASI			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Penyusunan Rencana Program Dan Penyusunan Rencana Anggaran		
	a. Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Anggaran	-	-
	b. Koordinasi. Konsultasi dan Penyiapan Rencana Kerja dan Anggaran	Terhalang karena pandemic covid-19	Dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom meeting
	c. Supervisi Pagu Indikatif dan hasil RKA-K/L Pagu Anggaran di lingkungan Kantor Wilayah	Terhalang karena pandemic covid-19	Dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi zoom meeting
	d. Penyusunan Usulan Disbursement Plant, Procurement Plan dan Kalender Kerja	-	-
2.	Pelaksanaan Pemantauan Evaluasi		
	a. Monitoring Penyusunan Program, Pelaporan dan Kehumasan	-	-



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



	b. Monitoring Pengelolaan Keuangan dan BMN dan Kepegawaian	Tidak dapat dilakukan monitoring langsung ke UPT karena pandemi	Monitoring dilakukan dengan aplikasi Zoom
3.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		
	a. Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan	Aplikasi SAKTI yang masih baru membutuhkan penyesuaian dari pengelola keuangan	Pelaksanaan Coaching Mentoring aplikasi SAKTI
4.	Pengelolaan Kepegawaian		
	a. Baperjakat Eselon IV dan V	Faktor Administrasi yaitu keseluruhan aspek yang berkaitan dengan persyaratan – persyaratan dan data data kepegawaian yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan Baperjakat	Updating data yang harus selalu berjalan pada setiap perubahan data-data kepegawaian setiap PNS
	b. Pelaksanaan Ujian Dinas TK I, Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penilaian JFT	Jaringan Wifi yang disediakan oleh tempat pelaksanaan kegiatan cenderung kurang baik sehingga banyak peserta yang tidak bisa tersambung ke jaringan internet.	Disarankan peserta menggunakan Data Internet Pribadi melalui tethering dengan HP masing-masing.
	c. Bina Mental Pegawai	Masih ada beberapa pegawai yang tidak mengikuti kegiatan Capacity Building karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan dan masih kurangnya rasa kebersamaan.	Lebih meningkatkan lagi rasa kebersamaan , kepedulian dan tanggung jawab secara moral individu
	d. Lanjutan Seleksi CPNS di lingkungan Kemenkumham Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none">- Proses terkendala karena ada nya pandemi covid- Keterbatasan Anggaran	<ul style="list-style-type: none">- Menerapkan Protokol Kesehatan dengan maksimal guna pencegahan penyebaran Covid 19, peserta diwajibkan memakai masker, Face shield dan sarung tangan- Menggunakan Anggara semaksimal mungkin dan seadanya supaya kegiatan tetap berjalan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



	e. Tes CAT Calon Taruna POLTEKIP/POLTEKIM	- Proses terkendala karena ada nya pandemi covid - Keterbatasan Anggaran	dengan lancar. - Menerapkan Protokol Kesehatan dengan maksimal guna pencegahan penyebaran Covid 19, peserta diwajibkan memakai masker, Face shield dan sarung tangan - Menggunakan Anggaran semaksimal mungkin dan seadanya supaya kegiatan tetap berjalan dengan lancar.
5.	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan		
	a. Pembinaan dan Pengelolaan BMN	-	-
	b. Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	-	-
6.	Reformasi Birokrasi di Wilayah		
	a. Penguatan SPIP	-	-
	b. Pembentukan Satuan Kerja WBK/WBBM	-	-
	c. Unit Layanan Pengaduan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	-	-
7.	Gaji dan Tunjangan		
	a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-
	b. Pembayaran Lembur	-	-
8.	Operasional Pemeliharaan Kantor		
	a. Kesehatan Pegawai	Kurangnya anggaran	Revisi anggaran
	b. Pakaian Dinas	-	-
	c. Pemeliharaan Gedung	-	-
	d. Pemeliharaan Peralatan Perkantoran	Tidak sebandingnya anggaran pemeliharaan yang ada dengan peralatan kantor yang ada	Pemberlakuan skala prioritas
	e. Pemeliharaan Kendaraan	Tidak sebandingnya anggaran pemeliharaan yang ada dengan kendaraan dinas yang ada	Pemberlakuan skala prioritas
	f. Langganan Daya Jasa	-	-
	g. Keperluan Perkantoran	Kebutuhan ATK masih terbatas.	Agar setiap kebutuhan masing - masing ruang dibuat sesuai pengajuan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



			kebutuhan, agar tidak saling berebut kebutuhan.
	h. Konsultasi dan Koordinasi	-	-
	i. Jamuan Tamu Pimpinan	-	-
	j. Honor Operasional Satker	-	-
	k. Sewa Operasional Perkantoran	-	-
	l. Penanganan dan Pencegahan Covid-19	<ul style="list-style-type: none"> - Protokol Kesehatan belum dilaksanakan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Penanganan dan Pencegahan belum dilaksanakan sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Sarana Prasarana masih terbatas karena anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Agar SOP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik mengenai penanganan dan pencegahan pengendalian penyebaran Covid-19 agar penyebaran dapat terkendali, pegawai pun dalam melaksanakan tugas dengan nyaman tidak was-was. - <i>Refocussing</i> anggaran dan ABT - Agar kenyamanan dalam bekerja dimasa pandemi lebih terjaga.

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ADMINISTRASI HUKUM UMUM

NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Layanan AHU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM		
	a. Layanan Notariat	-	-
	b. Layanan Kewarganegaraan	-	-
	c. Layanan Administrasi PPNS	-	-
	d. Layanan Advokasi	-	-
2.	Peningkatan Layanan AHU di Wilayah		
	a. Migrasi Data Layanan AHU	Tidak ada hambatan, dikerjakan oleh pihak ketiga	Tidak ada hambatan, dikerjakan oleh pihak ketiga
	b. Help Desk Layanan AHU	-	-
	c. Peningkatan Manfaat layanan AHU melalui Koordinasi dengan Instansi Terkait	Terkendala waktu yang lama karena persuratan melalui media sisumaker	Melakukan follow up secara langsung melalui wa/telepon
	d. Peningkatan Layanan AHU melalui Koordinasi dengan Ditjen AHU		
	e. Penanganan dan Pencegahan Covid-19	-	-
3.	Penyebaran Informasi Layanan AHU di Kanwil		



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



	a. Publikasi Layanan AHU di Wilayah	-	-
	b. Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah	-	-
4.	Layanan MKNW		
	a. Permohonan Pemanggilan Notaris	-	-
5.	Layanan MPW		
	a. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan MPD	-	-
6.	Layanan MPD		
	a. Tidak Lanjut Laporan Pengaduan	-	-
	b. Pemeriksaan Protokol Notaris	-	-
KEKAYAAN INTELEKTUAL			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Penyelesaian Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual		
	a. Menyelesaikan Penerimaan Permohonan Kekayaan Intelektual	Dikarenakan pendaftaran KI sudah dilakukan dengan sistem Online, banyak pemohon yang kebingungan dengan sistem Online tersebut. Tidak ada panduan, SOP, dan sosialisasi dari pusat terkait dengan pendaftaran KI online	Pemohon yang kebingungan datang ke kanwil untuk berkonsultasi langsung dengan pegawai. Dan terkait dengan tidak adanya panduan, SOP, dan sosialisasi dari pusat terkait dengan pendaftaran KI online, maka pegawai yang bertanggungjawab melakukan kontak via WA untuk mengetahui hal-hal yang diperlukan
	b. Pendampingan Pengajuan Permohonan Kekayaan Intelektual	Banyaknya jumlah pemohon yang rata-rata kebanyakan adalah ibu rumah tangga, serta banyak para pelaku usaha yang tersebar di seluruh Jawa Barat, pegawai pada Sub. Bidang KI merasa sulit untuk melakukan sosialisasi satu-persatu.	Dilakukanlah pendampingan pengajuan permohonan KI dengan cara mengumpulkan para pelaku usaha di satu waktu dan tempat terkait cara pendaftaran merek (Merek merupakan permohonan pendataran yang paling banyak diajukan)
	c. Koordinasi dengan Instansi Terkait	Sulitnya berkoordinasi karena ditiap instansi terkait berbeda nomenklatur.	Adanya koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait agar nantinya target dan capaian yang telah di tentukan dapat tercapai.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



	d. Penanganan dan pencegahan Covid 19		Dibagikan multi-vitamin, masker
2.	Melaksanakan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual		
	a. Promosi dan Diseminasi Desain Industri	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI	Diseminasi via <i>platform</i> digital ditingkatkan untuk kemudahan dan pemerataan penyebaran informasi
	b. Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual Komunal	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI	Diseminasi via <i>platform</i> digital ditingkatkan untuk kemudahan dan pemerataan penyebaran informasi
	c. Workshop/Sosialisasi/Seminar Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual lainnya	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI	Diseminasi via <i>platform</i> digital ditingkatkan untuk kemudahan dan pemerataan penyebaran informasi
3.	Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah		
	a. Kerjasama Pengawasan Potensi Pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Insansi Terkait	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI
4.	Pendampingan Penanganan Aduan/Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
	a. Penyelidikan / Penyidikan / Pengawasan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI
	b. Koordinasi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI	Luas wilayah jawa barat sebanding dengan fasilitas dan pegawai kanwil Sub. Bidang KI
PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM (SUNCANG)			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Melakukan fasilitasi harmonisasi perancangan peraturan daerah		
	a. Persiapan	-	-
	b. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah	a. Jumlah peserta tidak mencakup keseluruhan Pemda yang ada di Jawa Barat. b. Jumlah narasumber yang diperlukan tidak dapat menjangkau keseluruhan permasalahan yang sedang dihadapi	a. Jumlah peserta disesuaikan dengan keseluruhan Pemda yang ada di Jawa Barat (Bagian Hukum dan Sekretariat DPRD) b. Narasumber yang diperlukan disesuaikan dengan permasalahan yang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
 Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



			sedang dihadapi serta jumlah peserta
	c. Pelaksanaan	<p>a. Jumlah rapat pembahasan belum dapat mendukung pelaksanaan pengharmonisasian berdasarkan SE Menkumham M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 dan sering bersinggungan dengan kegiatan mediasi</p> <p>b. Biaya perjalanan dinas tidak menjangkau keseluruhan jumlah perancang</p>	<p>a. Perlu ada penegasan pelaksanaan rapat pengharmonisasian berdasarkan SE Menkumham M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019</p> <p>b. Perlu ada penegasan perancang yang ditempatkan di Subbid FPPHD</p>
	d. Penyusunan Laporan	-	-
	e. Penanganan dan Pencegahan covid-19	-	Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi
2.	Melakukan mediasi dan konsultasi peraturan daerah		
	a. Persiapan	-	-
	b. Pelaksanaan	Tertundanya pelaksanaan Konsultasi yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 khususnya dalam masa PSBB	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi dilaksanakan dengan pembatasan jumlah peserta konsultasi serta penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan kegiatan
	c. Penyusunan Laporan	-	-
3.	Melakukan Penilaian Angka Kredit Perancang		
	a. Persiapan	<p>a. Pelaksanaan kegiatan terhambat oleh Pandemi Covid 19.</p> <p>b. Persiapan yang dilaksanakan pada bulan terakhir di tahun 2020 dilakukan dengan singkat.</p>	Langsung menetapkan pelaksanaan kegiatan di maksud dengan memberikan tenggat waktu pelaksanaan, sehingga Perancang yang akan melakukan penilaian angka kredit bisa terpacu dalam pemberkasan dan segera mengumpulkan dokumen yang



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



			dibutuhkan guna penilaian angka kredit dimaksud.
b. Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">a. Pelaksanaan dilakukan dalam 4 (empat) kali rapat dengan waktu yang saling berdekatan.b. Pengumpulan berkas yang tidak bersamaan menyulitkan tim dalam melakukan penilaian.c. Dokumen pendukung yang sering kali belum lengkap menghambat tim dalam melakukan penilaian.d. Peraturan terbaru yang dikeluarkan membuat sekretariat harus bekerja ekstra dalam memberikan penjelasan kepada perancang yang akan melakukan penilaian angka kredit.e. Terdapat beberapa item penilaian yang belum ada contoh format dari pusat sehingga menyulitkan dalam penyeragaman format bagi para perancang.	<ul style="list-style-type: none">a. Sebaik mungkin menggunakan waktu yang ada dalam melaksanakan semua rapat yang direncanakan.b. Memberikan tenggat waktu yang jelas kepada para perancang terkait pengumpulan berkas angka kredit.c. Memberikan guide line yang jelas terkait dokumen pendukung yang harus dilampirkan oleh perancang yang akan melakukan penilaian angka kredit.d. Melakukan pembahasan Bersama terkait peraturan yang baru yang akan mempengaruhi penilaian angka kredit yang ada, dan menganalisis perbedaannya dengan tata cara penilaian sebelumnya, sehingga perancang yang akan melakukan penilaian angka kredit tidak akan dirugikan dengan peraturan yang baru.	
c. Penyusunan Laporan	Penyusunan laporan segera dilakukan setelah pelaksanaan selesai, karena penilaian angka kredit tahun 2020 ini hanya dilakukan satu	Untuk tahun-tahun selanjutnya penilaian angka kredit ini bisa dilakukan pada pertengahan tahun agar memberikan waktu yang	



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		kali pada akhir tahun. Hal ini dilakukan agar tidak menghambat kebutuhan perancang untuk kenaikan pangkat dan jabatan.	cukup untuk mengajukan kenaikan pangkat/golongan yang biasa dilakukan pada bulan April dan Oktober setiap tahunnya.
4.	Pola Karir Perancang Peraturan Perundang-undangan		
	a. Persiapan	Hambatan yang dialami pada saat melakukan koordinasi persiapan kegiatan ini, terutama karena akan dilaksanakan secara zoom, mengingat saat itu dilakukan di awal pandemic Covid-19.	Perlu ada pemberian penjelasan kepada pelaksana kegiatan, mengenai pelaksanaan kegiatan secara zoom.
	b. Pembinaan Pola Karir Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah	Hambatan yang dihadapi pada saat pelaksanaan kegiatan, terutama kualitas jaringan internet yang kurang stabil, baik di Kantor Wilayah maupun dari Instansi Pembina	Perlu ada perbaikan jaringan internet baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah
	c. Penyusunan Laporan	-	-
5.	Melaksanakan Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah		
	a. Persiapan	Hambatan sebagai mana dimaksud dalam hal persiapan, menyebabkan pembatalan jadwal kegiatan yang awalnya akan dilaksanakan pada minggu ketiga maret.	Melakukan koordinasi kepada peserta maupun narasumber baik melalui persuratan maupun kontak secara personal mengenai alasan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan untuk waktu yang belum bisa ditentukan menunggu perkembangan kebijakan pemerintah
	b. Pelaksanaan	Hambatan sebagaimana dimaksud dalam hal pelaksanaan adalah masih adanya ketakutan /kecemasan baik dari pihak peserta maupun narasumber karena dilaksanakan pada saat pandemic Covid 19	Penentuan lokasi di wilayah zona hijau dan lokasi pelaksanaan yang menerapkan protokol kesehatan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



	c. Penyusunan Laporan	Penyusunan laporan dilaksanakan pada saat pembatasan orang yang dapat bekerja dikantor	Penyusunan laporan dilaksanakan melalui mekanisme WFO dan WFH
6.	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik terbatas dan penjelasan mengenai permasalahan oleh stake holder masih kurang maksimal, sehingga tim harus menggali sendiri permasalahan dari suatu daerah.	Butuh waktu yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan naskah akademik agar dapat maksimal dalam menggali masalah dari pemrakarsa dari naskah akademik dimaksud.
7.	Analisa dan Evaluasi Hukum	<p>a. Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi hukum karena adanya pandemik covid 19, sehingga menyulitkan dalam koordinasi di lapangan dengan para anggota tim eksternal Kantor Wilayah, dan membuat pelaksanaan dilakukan secara daring.</p> <p>b. Kesibukan anggota tim eksternal sehingga harus mengatur jadwal agar bisa sesuai dalam pelaksanaan rapat internal analisa dan evaluasi hukum.</p>	<p>a. Pelaksanaan rapat tetap dilakukan secara langsung tidak melalui daring agar koordinasi lebih maksimal.</p> <p>b. Komitmen dari anggota tim eksternal agar memprioritaskan pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi hukum.</p>
PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Penelaahan Komunikasi Masyarakat	Saat klarifikasi kasus, ada sebagian yang tidak hadir	Diupayakan melakukan klarifikasi lewat telepon
2.	Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat		
	a. Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Ibu Kota Provinsi	Keterbatasan anggaran	Klarifikasi dilakukan melalui telepon dan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



			email
	b. Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Kab/Kota	Keterbatasan anggaran dan saat pemanggilan untuk klarifikasi tidak hadir	Klarifikasi dilakukan melalui email dan telepon
	c. Penanganan dan Pencegahan COVID-19	Pada saat kegiatan berlangsung ada beberapa yg diundang tidak hadir	Kecuali pada saat zona merah dibatasi untuk pelaksanaan kegiatan
3.	Penyusunan Laporan Pelayanan Komunikasi Masyarakat di wilayah	Untuk pelaporan yankomas disusun berdasarkan jumlah kasus. dan kadang dokumen tidak lengkap seperti KTP, dll.	Kita terima dan diganti dengan dokumen yang lain.
4.	Konsultasi teknis penyelenggaraan pemajuan HAM di wilayah	Tidak ada hambatan kecuali pada saat Jakarta Zona merah	Tidak ada hambatan kecuali mengikuti Protokol kesehatan
5.	Konsultasi teknis penyelenggaraan pemajuan HAM ke Pusat	Tidak ada hambatan, kecuali saat Pusat zona merah	Tetap berjalan dengan menerapkan protokol kesehatan dan tetap berkoordinasi lewat telepon
6.	Inventarisasi dan Identifikasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Tidak semua Kab/Kota mau memberikan Raperda	Meminta data kepada Pemprov terkait Raperda
7.	FGD Evaluasi Rancangan Produk hukum daerah	Ada ketakutan dari Pemda Kab Kota karena dikhawatirkan Raperdanya Direvisi	Memberikan batasan pengertian ke pada kab/Kota tentang batasan tentang HAM -
8.	Telaahan dan rekomendasi Rancangan Produk hukum daerah	Masih ada beberapa Raferda yang bersinggungan dengan HAM	Memberikan saran bahwasannya sebaiknya direvisi kalau benar2 bertentangan dengan HAM
	a. Telaahan dan rekomendasi Rancangan Produk hukum daerah Kab/kota hasil FGD	Kurangnya data yang masuk dan tidak semua Kab/kota memberikan Raperda	Meminta data ke pemprov dan telaahan dilakukan secara global saja.
9.	Evaluasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Masih ada kekurangan data dalam pelaporan aksi ham	Tetap berkoordinasi baik dtingkat kanwil, pemprov ataupun kab/kota
10.	Koordinasi Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM		
	a. Rapat Kerja Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Tidak semua kab/kota hadir saat rapat kerja,	Dibuat group sebagai sarana konsultasi utk kab/kota dalam



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



			pelaporan aksi ham dan hasil raker dikirim ke kab/kota
	b. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah	Terbatasnya anggaran	Koordinasi dilakukan melalui telepon dan Grou WA
11.	Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kab/Kota Peduli HAM	Tidak semua kab/kota mengirimkan persyaratan	Kanwil tetap berkoordinasi dan melakukan pembimbingan dalam proses pengisian dan pengumpulan persyaratan kkpham
12.	Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM		
	a. Rapat Koordinasi Kab/Kota Peduli HAM	Terbatasnya kegiatan dan anggaran, dan tidak semua kab/kota hadir saat rakor	Membuat group Ranham, dan membuat beberapa catatan penting yang kemudian dikirimkan ke kab/kota se Jawa Barat
	b. Pemeriksaan data usulan kriteria Kab/Kota Peduli HAM	Banyak data dukung yang tidak sesuai dengan permintaan / persyaratan/ tidak lengkap	Kanwil melakukan scan ulang dan memberitahukan kekurangan dakung ke kab/kota
	c. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang Kab/Kota Peduli HAM	Beberapa kab/kota kurang aktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah	Dilakukan pembimbingan khusus baik secara webinar maupun konsultasi
13.	Persiapan Diseminasi HAM Kab/Kota	Terbatasnya kegiatan	Dipilih salah satu kab/kota
	Pelaksanaan Diseminasi HAM di Kab/Kota	Terbatasnya kegiatan	Dipilih salah satu kab/kota
PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL (BPHN)			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Pemeriksaan dan Upaya Hukum Biasa		
	a. Tahap Penyidikan/Gugatan/Pemeriksaan Pendahuluan	Tidak semua OBH melaksanakan kegiatan litigasi dari tahap	Revisi Anggaran
	b. Tahap Persidangan/Putusan di Pengadilan tingkat I	-	-
	c. Tahap Persidangan/Putusan di Pengadilan Tingkat Banding/Kasasi	Jarang sekali OBH yang melaksanakan kegiatan litigasi sampai dengan ke tingkat Banding/Kasasi	Revisi Anggaran
2.	Penyebarluasan Informasi dan Penanganan Perkara diluar Pengadilan		
	a. Penyuluhan Hukum	Beberapa OBH tidak dapat melaksanakan	Dilaksanakan secara virtual



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		penyuluhan hukum karena Covid 19	
	b. Pemberdayaan Masyarakat	Beberapa OBH tidak dapat melaksanakan penyuluhan hukum karena Covid 19	Dilaksanakan secara virtual
	c. Penelitian Hukum	Masih ada OBH yang melaksanakan penelitian secara normatif padahal seharusnya penelitian empiris	dialihkan anggaran ke kegiatan lain
	d. Mediasi	jarang yang melaksanakan karena kasuistis	dialihkan anggaran ke kegiatan lain
	e. Pendampingan di luar Pengadilan	jarang yang melaksanakan karena kasuistis	dialihkan anggaran ke kegiatan lain
3.	Konseling dan Pembuatan Dokumen Hukum		
	a. Konsultasi Hukum	-	-
	b. Drafting Dokumen Hukum	-	-
4.	Pemantauan dan Evaluasi Oleh Panitia Pengawas Daerah	Khusus untuk kasus-kasus perdata penerima bantuan hukum sudah tidak ada didaerahnya karena himpitan ekonomi kebanyakan sudah bekerja di kota-kota besar sebagai ART atau buruh	pemantauan dilakukan kepada keluarga terdekat
5.	Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum (Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah)	Tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka karena adanya PSBB di masa pandemi Covid 19	Dilaksanakan secara virtual
6.	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung		
	a. Ceramah Hukum Terpadu	-	-
7.	Penyuluhan Hukum Tidak Langsung		
	a. Dialog Perbincangan Penyuluhan Hukum di Radio dan/atau Televisi	-	-
	b. Sosialisasi Hukum Melalui Webinar	-	-
8.	Pembinaan/Pembentukan Desa/kelurahan/Sekolah Sadar Hukum dan Pembinaan Penyuluh Hukum		
	a. Pendampingan Peserta Lomba Kadarkum Tingkat Nasional	tidak dilaksanakan karena covid 19	Revisi Anggaran



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



	<i>b.</i> Evaluasi/Pembinaan Kelompok Kadarkum/Desa/ Kelurahan/Sekolah Sadar Hukum	-	-
9.	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Bahan yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik terbatas dan penjelasan mengenai permasalahan oleh stake holder masih kurang maksimal, sehingga tim harus menggali sendiri permasalahan dari suatu daerah.	Butuh waktu yang cukup dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyusunan naskah akademik agar dapat maksimal dalam menggali masalah dari pemrakarsa dari naskah akademik dimaksud.
10.	Analisa dan Evaluasi Hukum	<ul style="list-style-type: none">- Keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi hukum karena adanya pandemik covid 19, sehingga menyulitkan dalam koordinasi di lapangan dengan para anggota tim eksternal Kantor Wilayah, dan membuat pelaksanaan dilakukan secara daring.- Kesibukan anggota tim eksternal sehingga harus mengatur jadwal agar bisa sesuai dalam pelaksanaan rapat internal analisa dan evaluasi hukum	<ul style="list-style-type: none">'- Pelaksanaan rapat tetap dilakukan secara langsung tidak melalui daring agar koordinasi lebih maksimal.- Komitmen dari anggota tim eksternal agar memprioritaskan pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi hukum.
11.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan JDIH	kordinasi dilaksanakan ke Setwan DPRD di tiap Kabupaten/Kota namun respon terkait JDIH masih kurang dan banyak tidak memahami	Kerjasama dengan Biro Hukum Pemprov untuk kedepannya untuk mendorong integrasi JDIH di DPRD Kabupaten/Kota
12.	Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi	seharusnya dilaksanakan pada masa PSBB di Jawa Barat namun diundur pelaksanaannya	Dilaksanakan setelah PSBB berakhir (telah dilaksanakan di bulan Agustus 2020)
13.	Peningkatan Layanan Perpustakaan	belum adanya kartu keanggotaan dan pemantauan	Pembuatan fitur registrasi keanggotaan dan peminjaman buku



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		peminjaman secara mudah	menggunakan aplikasi SIPELET
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Pengkajian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
	Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Terbatasnya anggaran dan luasnya wilayah cakupan Jawa Barat	Dipilih salah UPT sebagai sample dengan meminta data langsung
	Penanganan dan Pencegahan COVID-19	-	-
2.	Pengembangan Hasil Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		
	Sosialisasi Hasil Litbang Hukum dan HAM	Keterbatasan kegiatan	Memilih materi yang sesuai serta melihat jumlah peserta yang akan dijadikan sampling
DIVISI PEMASYARAKATAN			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Pembinaan Layanan WBP		
	Sidang Tim Pengamat Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberian program integrasi berupa asimilasi, PB, CMB dan CB masih ada yang belum tepat waktu b. Belum optimal dalam pengusulan program integrasi secara online melalui SDP 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengingat kembali kepada UPT mengenai mekanisme dan tata cara pengusulan program integrasi secara online melalui SDP b. Perlu dilakukan penguatan tugas operator yang menangani SDP c. Pemenuhan sarana dan prasarana SDP
	Pemberian Remisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengusulan remisi pertama kali, seringkali Lapas/Rutan tidak melampirkan salah satu persyaratan yaitu berita acara pelaksanaan putusan (BA 8) dari Kejaksaan b. Keterlambatan pengusulan remisi umum maupun khusus dan pidana khusus terkait PP 99/2012 c. Belum adanya ketetapan tanggal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengingat kembali kepada Unit Pelaksana Teknis mengenai persyaratan pengusulan remisi umum dan khusus b. Menetapkan dengan ketentuan yang jelas terhadap permasalahan yang dimaksud. Ketentuan mengenai tanggal keseragaman pengiriman usulan remis khusus, umum dan susulan, ditetapkan dengan edaran/buku pedoman



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		batas pengusulan remisi umum maupun khusus dan susulan	c. Menetapkan dengan ketentuan yang jelas mengenai batas minimal persyaratan dalam pengusulan remisi tambahan pemuka kerja narapidana
2.	Layanan Kerjasama, Komunikasi dan Informasi		
	Pameran	Hasil karya Belum bersifat berkesinambungan sehingga agak kesulitan apabila ada pesanan dalam jumlah banyak.	<p>a. Barang hasil karya yang dipajang masih tetap diproduksi didalam Lapas/ Rutan, sehingga apabila ada pesanan tidak menyulitkan dalam pengadaannya.</p> <p>b. Melakukan Monitoring mekanisme pengiriman, media promosi dan penjualan Hasil Karya Narapidana</p>
	Rapat Koordinasi Dilkumjakpol Plus	<p>a. Sinergitas Aparat Penegak Hukum dalam bidang :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penerimaan Tahanan baru di Lapas/ Rutan - Pengawasan dan pembimbingan Klien Masyarakatan - Pengelolaan Basan Baran di Rupbasan - Penanganan ABH sesuai SPPA <p>2. Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan sinkronisasi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana (jajaran Masyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, BNN) di wilayah Jawa Barat) secara optimal serta pelibatan/dukungan instansi terkait .</p>	<p>Penguatan peran dan fungsi lembaga penegak hukum yang tergabung dalam forum DILKUMJAKPOL serta lembaga lainnya dengan agenda pembahasan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penerimaan tahanan baru selama masa pandemic covid-19 dan penanganan Overstaying dan penanganan tahanan khusus pengguna Narkotika ; b. Mekanisme pengawasan dan pembimbingan klien masyarakatan terutama yang sedang menjalani asimilasi rumah. c. Penyerahan / penitipan Basan Baran di Rupbasan d. Perlakuan ABH dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
	Unit Layanan Pengaduan	Masih adanya keterlambatan dalam	Pembentukan dan operasionalisasi Tim Layanan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		pelaporan tindak lanjut pengaduan dikarenakan kekeurangan data klarifikasi dan investigasi.	Pengaduan pada Divisi Pemasyarakatan yang terintegrasi
	Unit Layanan Informasi	Kegiatan Penyajian layanan Informasi yaitu rangkaian kegiatan Layanan publik berupa penyajian informasi dan publikasi masih belum maksimal	Optimalisasi pelaksanaan layanan informasi melalui pembentukan Tim dan pemenuhan sarana prasarana
3.	Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Barat		
	Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan di Wilayah Jawa Barat	a. Keterbatasan Anggaran b. Penguatan SDM c. Luasnya wilayah kerja dan variasi permasalahan di masing-masing UPT Pemasyarakatan	a. Optimalisasi anggaran b. Pelaksanaan penguatan kapasitas SDM c. Inventarisasi masalah
4.	KONSULTASI TEKNIS PEMASYARAKATAN		
	Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	a. Keterbatasan anggaran b. Kekurangan SDM	a. Optimalisasi anggaran b. Pelaksanaan penguatan kapasitas SDM c. Inventarisasi masalah di bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi
	Konsultasi Teknis Pemasyarakatan Di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	a. Keterbatasan anggaran b. Kekurangan SDM	a. Optimalisasi anggaran b. Pelaksanaan penguatan kapasitas SDM c. Inventarisasi masalah di bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan
5.	KOORDINASI TEKNIS PEMASYARAKATAN		
	Koordinasi Teknis Pemasyarakatan Di Bidang Pembinaan, Bimbingan Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi	Masih belum optimalnya sinkronisasi pelaksanaan tugas antara pusat wilayah dan Satker di daerah terkait	a. Tindak lanjut masalah hubungan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan, Bimbingan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



	dan Komunikasi	pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pembinaan, Bimbingan Masyarakat, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi	Pemasyarakatan, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi b. Keseriusan penanganan secara berkesinambungan
	Koordinasi Teknis Masyarakat Di Bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan Narapidana/Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	Masih belum optimalnya sinkronisasi pelaksanaan tugas antara pusat wilayah dan Satker di daerah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan narapidana /Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara	a. Tindak lanjut masalah hubungan internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Keamanan, Kesehatan, dan Perawatan narapidana /Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara b. Keseriusan penanganan secara berkesinambungan
6.	PENGENDALIAN UPT PEMASYARAKATAN		
	Pencegahan dan Penindakan Kamtib	a. Masih ada peredaran HP Pungli dan Narkoba. b. Masih ada petugas yang terlibat dalam peredaran Halinar	a. Optimalisasi Tim Satgas kamtib di UPT dan wilayah b. Pemberian sanksi yang jelas dan tegas.
	Mutasi/Pemindahan	a. Keterbatasan anggaran b. Hamper semua Lapas di wilayah Jawa Barat mengalami over kapasitas	a. Optimalisasi anggaran b. Koordinasi dengan Ditjenpas c. Redistribusi pemetaan jumlah hunian di semua Lapas wilayah Jawa Barat
	Monitoring & Evaluasi Unit Pelaksana Teknis Masyarakat	Wilayah kerja Divisi Masyarakat meliputi 42 UPT Masyarakat yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota di Jawa Barat , sehingga muncul kendala : 1. Keterbatasan anggaran 2. Kekurangan SDM	a. Sebagai salah satu fungsi manajemen yaitu pengendalian atau supervisi. b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) kinerja c. Membantu penentuan langkah-langkah yang berkaitan dengan kegiatan/program kerja selanjutnya



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



DIVISI KEIMIGRASIAN			
NO	KEGIATAN	HAMBATAN	SOLUSI
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Bidang Fasilitatif Fungsi Keimigrasian		
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran	Kurangnya perolehan data untuk dijadikan acuan dalam penyusunan rencana program dan anggaran	Peningkatan koordinasi dengan operator RKA/KL dalam pemenuhan data yang lengkap dan akurat
	Koordinasi dan Pengelolaan SDM, Sarana Prasarana dan Administrasi Keuangan	Kurang maksimalnya anggaran karena MP tidak turun 100 % dan terpengaruh pandemi <i>Covid-19</i>	Memanfaatkan anggaran belanja yang tersedia dengan anggaran UPT disesuaikan dengan kegiatan
	Penanganan dan Pencegahan COVID-19	Tidak tersedianya anggaran secara khusus untuk penanganan dan pencegahan <i>Covid-19</i>	Mengajukan alokasi anggaran khusus untuk penanganan dan pencegahan <i>Covid-19</i>
2.	Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama dan Evaluasi Bidang Teknis Keimigrasian		
	Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Berkurangnya anggaran karena dialihkan untuk penanganan dan pencegahan pandemi <i>Covid-19</i> serta wajib memenuhi Protokol Kesehatan dari Pemerintah Daerah setempat	Memanfaatkan anggaran yang tersedia dan memenuhi Protokol Kesehatan dari Pemerintah Daerah setempat
	Koordinasi TIMPORA	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i>	Rapat Koordinasi Timpora melalui Daring
3.	Penyusunan Materi	Nihil	Sudah sesuai ketentuan
4.	Koordinasi dan Pembahasan	Nihil	Sudah sesuai ketentuan
	Penyelidikan Intelijen Keimigrasian Wilayah Barat	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i> dan Protokol Kesehatan yang ketat dan kurangnya anggaran	Memanfaatkan semaksimal mungkin anggaran yang tersedia dan meningkatkan sinergitas, kolaborasi dan <i>chemistry</i>
5.	Perencanaan	Kurang maksimalnya perolehan data sebagai acuan dalam perencanaan	Mendapatkan perolehan data selengkapnya
6.	Pengumpulan Data dan Informasi	Kurang maksimalnya perolehan data sebagai acuan dalam perencanaan	Mendapatkan perolehan data selengkapnya
7.	Pengolahan Data dan Informasi	Nihil	Sudah sesuai ketentuan
8.	Penyajian Laporan	Nihil	Sudah sesuai ketentuan



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



	Operasi Mandiri Wilayah Barat	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i> , Protokol Kesehatan, Kekurangan anggaran	Memfaatkan anggaran yang tersedia dan bekerja sama dengan UPT Imigrasi
9.	Persiapan Rencana Kegiatan	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i> , Protokol Kesehatan, Kekurangan anggaran	Memfaatkan anggaran yang tersedia dan bekerja sama dengan UPT Imigrasi
10.	Pelaksanaan Pengawasan	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i> , Protokol Kesehatan, Kekurangan anggaran	Memfaatkan anggaran yang tersedia dan bekerja sama dengan UPT Imigrasi
11.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i> , Protokol Kesehatan, Kekurangan anggaran	Memfaatkan anggaran yang tersedia dan bekerja sama dengan UPT Imigrasi
	Operasi Gabungan Wilayah Barat	Tidak adanya Anggaran untuk pelaksanaan Operasi Gabungan karena sudah dialihkan ke kegiatan lain	Memfaatkan anggaran yang tersedia dan bekerja sama dengan UPT Imigrasi
12.	Persiapan Rencana Kegiatan	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i> , Protokol Kesehatan, Kekurangan anggaran	Memfaatkan anggaran yang tersedia dan bekerja sama dengan UPT Imigrasi
13.	Pelaksanaan	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i> , Protokol Kesehatan, Kekurangan anggaran	Memfaatkan anggaran yang tersedia dan bekerja sama dengan UPT Imigrasi
14.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi	Terkendala pandemi <i>Covid-19</i> , Protokol Kesehatan, Kekurangan anggaran	Memfaatkan anggaran yang tersedia dan bekerja sama dengan UPT Imigrasi
	Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah Barat	Kurang optimalnya komunikasi dan perhatian terhadap hal-hal yang non teknis kepada pihak Kejaksaan sebagai JPU	Membangun suatu hubungan yang kuat dalam berkomunikasi dan perhatian kepada hal-hal yang sifatnya non teknis kepada Kejaksaan sebagai JPU
15	Penyelidikan	Kurang optimalnya potensi SDM penyelidik dalam hal teknis dan taktis penyelidikan	Lakukan bimbingan dan pembinaan teknis dan taktis kepada Petugas Penyelidik
16	Penyidikan	Kurang maksimalnya wawasan, pengetahuan, dan pengalaman Petugas Penyidik	Melakukan bimbingan, arahan petunjuk, dan pembinaan terkait teknis dan taktis penyidikan kepada Petugas Penyidik



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



Permulaan	Kurang maksimalnya dalam pencarian /perolehan bahan keterangan terhadap barang bukti dan alat bukti	Melakukan bimbingan, arahan, petunjuk, dan teknis PULAHTA
Olah TKP	Kurang optimalnya perolehan pulbaket dan bukti-bukti dokumentasi	Lakukan peningkatan dalam pulbaket dan perolehan bukti dengan cara dokumentasi yang akurat
Upaya Paksa	Tidak ada hambatan	Lakukan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Pemeriksaan	Kurang optimalnya lakukan Teknik dan Taktis pemeriksaan	Lakukan sebanyaknya perolehan pulbaket dan bukti permulaan yang cukup dengan minimal 2 (dua) orang saksi dan barang bukti serta alat bukti yang cukup
Penyerahan Berkas Perkara	Tidak ada hambatan	Lakukan pemberkasan selengkapnya dan seakurat mungkin
Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti	Tidak ada hambatan	Lakukan pemberkasan selengkapnya dan seakurat mungkin



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



BAB II PERENCANAAN/PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merupakan landasan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2020 – 2024 merupakan panduan dalam Perencanaan dan Pelaksanaan yang di dasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Maka dari itu, penetapan Program dan Kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Ham RI Tahun 2020 – 2024 yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penetapan Program dan Kegiatan diselaraskan dengan visi misi serta tata nilai pada Kementerian Hukum dan HAM RI, adapun visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai berikut :

Visi :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Misi :

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan
7. Melaksanakan tata laksanaan pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

Untuk memandu pencapaian Visi dan Misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai- nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah :

1) Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3) Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4) Transparan

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan,



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5) Inovatif

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

2.2. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Rencana Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat menyesuaikan dengan rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi.

Di dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran strategis yang akan dicapai dan menjadi fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun rencana strategis pada tahun 2020-2024 sebagai berikut;

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah , pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan Bidang Masyarakat;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



5. Penguatan pelayanan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah 1) bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyuksekkan pembangunan nasional, 2) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, 3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi, 4) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah, 5) dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat terdapat 4 Kepala Divisi yang masing-masing memiliki dokumen Perjanjian Kinerja (PK), adapun Perjanjian Kinerja masing-masing divisi adalah sebagai berikut;

a. Divisi Administrasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	85



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



No	Kegiatan	Anggaran
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp. 22.301.673.000

b. Divis Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

• Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah yang efektif	Indeks tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	3,0
		Presentasi layanan program AHU di Kantor Wilayah yang diselesaikan	80%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 3.064.000.000

• BPHN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi.	543 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin.	77 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah.	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluh hukum di daerah.	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah.	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sisten JDIHN	1 Kantor Wilayah

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp. 5.625.320.000

• Peraturan Perundang-Undangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	28 raperda



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	24 orang
---	---	--	----------

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah	Rp. 164.548.000

• **Kekayaan Intelektual**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	800 Jumlah Permohonan
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para <i>stakeholder</i> KI oleh Kantor Wilayah	30 <i>Stakeholders</i>
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor wilayah	Rp. 894.006.000

• **Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis net	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak yang disosialisasikan di Wilayah	1 Buku

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah	Rp. 66.294.000



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



• **HAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	11 Instansi Pemerintah
		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	4 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di Wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 rekomendasi

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 263.206.000

c. Divisi Keimigrasian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pelayanan keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian di wilayah	7,3
2	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian	Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian	2%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum dan Keimigrasian	Rp. 84.668.159.000

d. Divisi Pemasyarakatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan	Indeks kualitas terhadap layanan pemasyarakatan di wilayah	7,0
2	Meningkatnya produktivitas narapidana dan klien pemasyarakatan menuju manusia mandiri	Persentase mantan narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%
3	Terwujudnya mantan narapidana/anak yang taat hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	1%
4	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah.	55%

No	Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	Rp. 447.113.710.000



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik. Capaian Kinerja biasanya diukur secara triwulan, semester ataupun tahunan sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Capaian Kinerja dalam pelaksanaannya kemudian diinput ke dalam aplikasi *e-performance.kemendikham.go.id*. Aplikasi *e-performance* dapat memantau capaian kinerja berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang kemudian dijadikan bahan untuk melakukan monitoring dan evaluasi.

3.1.1. Perbandingan Nilai E-Performance Tahun 2019 & 2020

E-performance adalah sebuah sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan sebagai proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Capaian Kinerja Divisi Administrasi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Jawa Barat	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	7,0	9,39	134%
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	85	100	125%
		Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	85	85	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan kantor wilayah kementerian hokum dan HAM Jawa Barat	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	70,1	95,48	136%
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat	70	86,51	123%
		Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor	90	90	100%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat			
--	--	--	--	--	--

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Program Administrasi Hukum Umum

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Jawa Barat yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat	3	3	100%
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Jawa Barat yang diselesaikan	80	100	125%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terselenggaranya administrasi pelayanan jasa hukum di wilayah	Penyelenggaraan administrasi pelayanan hukum di bidang fidusia, notariat dan kewarganegaraan	12	12	100%

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di wilayah Jawa Barat	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	800	9.820	1.227%
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	4	5	125%
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	1	1	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terciptanya layanan kekayaan intelektual di kantor wilayah Jawa Barat yang berkualitas baik sekali	Persentase permohonan kekayaan intelektual yang diterima kantor wilayah jawa barat	100	100	100%
		Persentase penyelenggaraan promosi dan diseminasi di daerah Jawa Barat	100	100	100%



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		persentase penyelenggaraan penegakan hukum di daerah Jawa Barat	100	100	100%
		Meningkatkan database kekayaan intelektual komunal kantor wilayah Jawa Barat	100	100	100%

**Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Program Pembentukan Hukum**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	28	28	100%
		Jumlah tenaga perancang peraturan perundang-undangan di wilayah yang mendapatkan pembinaan	24	24	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Fasilitasi pembentukan produk hukum daerah	Persentase (%) rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi sesuai permohonan	28	125	446%
		Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan substansi perancang peraturan daerah	25	25	100%

**Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Program Pemajuan HAM**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	27	27	100%
		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	27	13	48%
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	50	38	76%
		Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	10	8	80%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	20	25	125%
		Jumlah Kab/Kota peduli HAM	25	26	104%
	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	Jumlah layanan Hak Asasi Manusia di wilayah	1	1	100%

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Program Pembentukan Hukum Nasional

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum di lingkungan Kantor Wilayah	1126	1262	112%
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok miskin	122	326	267%
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	6	6	100%
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	terselenggaranya pembinaan dan pembangunan hukum ditingkat daerah dengan didukung perencanaan hukum ditingkat daerah , analisis dan evaluasi hukum di daerah , peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan terselenggaranya bantuan hukum serta tersediannya dokumentasi dan jaringan informasi hukum	Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	526	1.614	306%
		Jumlah kegiatan bantuan hukum non kepada orang atau kelompok masyarakat miskin	37	68	183%
		Terlaksananya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	2	10	500%
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1	2	200%
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1	1	100%
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	2	3	150%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		Pelatihan/peningkatan kapasitas OBH dan paralegal (tematik)	50	50	100%
--	--	---	----	----	------

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Program Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Balitbangkumham	2	2	100%
		Hasil penelitian/pengkajian Balitbangkumham yang disosialisasikan di wilayah	1	1	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Termanfaatkan rekomendasi hasil kajian wilayah dalam penentuan tema penelitian badan Penelitian dan Pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian diwilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	20%	20%	100%
2.	Sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan Hak Asasi Manusia yang di sosialisasi di wilayah	1	1	100%

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kualitas terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah Jawa Barat	7,0	7,0	100%
2.	Meningkatnya Produktivitas Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%	35%	100%
3.	Meningkatkan Ketaatan Hukum Mantan	Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Barat	1%	7%	700%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan				
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan permasyarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan permasyarakatan di Jawa Barat	90%	90%	100%
2.	Meningkatkan produktivitas narapidana atau anak menuju manusia mandiri yang berdaya guna	Persentase mantan narapidana atau anak yang berhasil Jawa Barat	30%	30%	100%
3.	Meningkatkan ketaatan hukum mantan narapidana anak dan klien permasyarakatan	Menurunnya persentase residivis Jawa Barat	10%	10%	100%
4.	Meningkatkan kualitas kegiatan pembinaan narapidana ; pelayanan tahanan ; pembimbingan klien permasyarakatan; dan pengelolaan basan baran	persentase basan baran yang dikelola sesuai dengan standar jawa barat	90%	90%	100%
		Persentase tahanan mendapatkan perawatan dan pengadministrasian sesuai dengan standar jawa barat	90%	90%	100%
		Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan sesuai dengan standar jawa barat	90%	90%	100%
		Persentase anak yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan standar jawa barat	90%	90%	100%
		Persentase klien yang mendapatkan bimbingan kemasyarakatan dan pengawasan sesuai dengan standar jawa barat	90%	90%	100%
		Persentase tindak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan permasyaraktan sesuai dengan standar jawa barat	90%	90%	100%



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Jawa Barat	7	7	100%
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Jawa Barat	2%	2%	100%
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Jumlah Pelayanan Keimigrasian yang Diselesaikan Sesuai dengan Ketentuan	782.607	782.607	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	7,3	8	110%
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah penyelesaian tindak pidana keimigrasian sesuai dengan ketentuan	466	466	100%

Berdasarkan data pada tabel Capaian Kinerja Tahun 2020 dan dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat sudah sangat baik karena sebagian besar indikator kinerja mencapai target yang sudah ditetapkan, bahkan beberapa indikator kinerja melampaui/melebihi target yang sudah ditetapkan.

3.1.2. Target Kinerja

Target Kinerja (Tarja) adalah strategi yang ditetapkan untuk melakukan percepatan pelaksanaan suatu kegiatan yang kemudian dituangkan dalam rencana aksi. Target kinerja bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, reformasi hukum berbasis e-gov di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, meningkatkan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan HAM, peningkatan kompetensi SDM dan bertujuan untuk mendorong penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



Penilaian Target Kinerja didasarkan pada target yang sudah pada awal tahun. Penilaian Target Kinerja dilakukan per-triwulan dengan nilai 1-100. Adapun nilai Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2020 sebagai berikut;

NO	TARGET KINERJA	UKURAN KEBERHASILAN	NILAI			
			B.03	B.06	B.09	B.12
KEPALA KANTOR WILAYAH						
1.	Seluruh Satuan Kerja melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB)	Meningkatnya jumlah Satuan Kerja yang memperoleh Nilai RB Sangat Baik (>70-80)	100	100	100	100
2.	Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan fokus kepada peningkatan pelayanan publik, pencegahan korupsi dan peningkatan nilai maturitas SPIP	Meningkatnya tingkat maturitas SPIP Kemenkumham terdefinisi dengan interval skor 3 menuju 4	90	100	100	100
		Terseleenggaranya penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan Permenkumham Nomor 5 Tahun 2018	85	100	100	100
3.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Itjen dan BPK	100	100	100	100
4.	Optimalisasi Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI berbasis teknologi informasi	Tercapainya pelaporan LHKASN 100%	100	100	100	100
KEPALA DIVISI ADMINISTRASI						
5.	Peningkatan citra positif Kementerian Hukum dan HAM	Informasi Kementerian Hukum dan HAM disebarakan di seluruh media sosial (FB, Instagram, dan Twitter) seluruh Satuan Kerja	100	100	100	100
6.	Peningkatan Disiplin pegawai terhadap kehadiran	1. Penegakan Disiplin sudah sesuai Peraturan yang berlaku 2. Presentasi pegawai yang Tidak Masuk Kerja atau Terlambat tanpa keterangan dibawah 15% untuk masing-masing unit	100	100	100	100



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
 Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



7	Laporan Keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	100
8.	Implementasi SIPaSTIKU	Seluruh Kantor Wilayah menggunakan SIPaSTIKU	100	100	100	100
9.	Mewujudkan Pelayanan Kementerian Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI)	Pengembangan infrastruktur dan aplikasi di unit utama dan Kanwil tidak tumpang tindih atau duplikasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi anggaran TI Kemenkumham	-	100	100	100
10.	Mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM <i>Corporate University</i> pada Kantor Wilayah dan UPT	90% pegawai Kantor Wilayah dan UPT telah mendapatkan internalisasi Kemenkumham <i>Corporate University</i>	100	100	100	100
		90% pejabat administrator dan Ka. UPT di Kanwil memahami Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	100	100	100	100
11.	Monitoring dan evaluasi proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019	90% proyek perubahan alumni Diklat PIM III dan IV tahun 2019 yang ditindaklanjuti di Kanwil	100	100	100	100
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM						
12.	Peningkatan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham dalam pengharmonisan, pemantapan, dan pembulatan konsepsi produk hukum daerah	Terlaksananya pengharmonisan, pemantapan, dan pembulatan konsepsi pada produk hukum daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan pada masing-masing Kanwil Kemenkumham	100	100	100	100
13.	Menciptakan kondisi/iklim ramah investasi yang antisipatif terhadap adanya tindak pidana pencucian uang	Meningkatnya jumlah pelapor Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Ownership</i>) di Wilayah.	100	100	100	100
14.	Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten	Meningkatnya pendaftaran/pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum yang dapat mendukung peningkatan investasi di Wilayah	100	100	100	100



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



15.	Meningkatkan pengawasan notaris melalui pengenalan pengguna jasa notaris untuk menghindari praktik pencucian uang	Meningkatnya pengawasan Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah terkait penerapan PMPJ oleh Notaris di Wilayah	100	100	100	100
16.	Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual (KI)	Terbentuknya Peta Potensi Kekayaan Intelektual sebagai dasar diseminasi	100	100	100	100
17.	Meningkatkan pendaftaran Kekayaan Intelektual melalui peningkatan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Sentra KI dan komunitas-komunitas	- Meningkatnya Jumlah Permohonan KI di Provinsi/Kabupaten/Kota - Meningkatnya Jumlah inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal di Kabupaten/ Kota/Provinsi	100	100	100	100
18.	Optimalisasi pemetaan potensi Pelanggaran kekayaan intelektual dan Pengawasan Indikasi Geografis (IG) di Wilayah	- Tersedianya peta Potensi pelanggaran KI - Terjaminnya konsistensi mutu produk IG sesuai dengan buku deskripsi IG	100	100	100	100
19.	Meningkatkan Koordinasi dengan <i>Stakeholders</i> Dalam Rangka Mendorong Penyelesaian Dugaan Pelanggaran HAM	Tindak lanjut dugaan pelanggaran/permasalahan HAM oleh instansi terkait/pemangku kepentingan	100	100	100	85
20.	Mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan Aksi HAM dan melaporkannya melalui sistem pemantauan yang dikelola oleh unit kerja di bawah presiden	Pemerintah Daerah telah melaporkan Aksi Hak Asasi Manusia	100	100	100	100
21.	Mendorong Terwujudnya Kabupaten/Kota Peduli HAM	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapat kriteria Peduli HAM	100	100	100	85
22.	Mendorong terwujudnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM	Dokumen analisis dan rekomendasi materi muatan HAM dalam Rancangan Produk Hukum Daerah	100	100	100	100
23.	Pembentukan Pos Yankomas di UPT	SK Pembentukan dan Pelaksana Pos Yankomas di seluruh UPT	90	100	100	100
24.	Terintegrasinya Dokumen Hukum Daerah dalam <i>Database</i> Dokumen Hukum Nasional	Bertambahnya jumlah Anggota JDH di tingkat daerah yang terintegrasi dengan portal jdih.go.id	100	100	100	100
25.	Tersedia Perpustakaan Hukum <i>online</i> di setiap kantor wilayah	Pemanfaatan Aplikasi ILDIS/JDIH Kanwil untuk Layanan Perpustakaan Hukum	100	100	100	80



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
 Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		<i>Online</i> di lingkungan Kantor Wilayah				
26.	Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah terkait Pemberdayaan UMKM dan/atau Cipta Lapangan Kerja	Tersusunnya rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum daerah	100	100	100	-
27.	Pengawasan dan Perluasan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum	100	100	100	-
28.	Kajian Hukum dan HAM di wilayah dengan tema: 1. Kesiapan Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis Menuju Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Corporate University</i> 2. Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat	Termanfaatkannya Rekomendasi hasil kajian sebagai data awal (data sekunder) penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	100	100	100	-
29.	Layanan Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM (SIPKUMHAM) yang mendukung pembuatan kebijakan di wilayah	Laporan Analisis kebijakan dan reporting berbasis hukum dan HAM serta pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM	100	100	100	100
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN						
30.	Percepatan pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan guna penanganan over kapasitas <i>overstaying</i> dan peningkatan keterampilan narapidana melalui kerjasama	Penanganan <i>overstaying</i> melalui penguatan data dan kerjasama dengan stakeholder	100	100	100	100
		Penanganan <i>overcapacity</i> melalui pemberian hak kepada narapidana secara online	100	100	100	100
		Narapidana yang terlatih, terampil dan bersertifikat	100	100	100	100
31.	Meningkatkan koordinasi, kewaspadaan, terhadap gangguan keamanan dan ketertiban (kamtib) dan pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba di Lapas/Rutan	Seluruh Lapas/Rutan melakukan koordinasi pengamanan dengan instansi terkait	95	100	100	100
		Seluruh Lapas/Rutan telah melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan kamtib	95	90	100	100
		Terlaksananya Sidak dan Tes Urin Bagi Petugas dan Narapidana	85	100	100	100



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
 Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



		<ul style="list-style-type: none"> - Kedisiplinan Petugas - Pelaksanaan Tugas Pengamanan area Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) dan Pengaman Pintu Utama (P2U) - Pelaksanaan Layanan Kunjungan - Pelaksanaan Penjagaan - Pengamanan Pelaksanaan Mapenaling - Pelaksanaan Pengawasan - Pelaksanaan Penempatan Narapidana/Tahanan Dalam Kamar Hunian - Layanan Penyediaan Makanan dan Kebutuhan Dasar Lainnya - Layanan Registrasi dan Integrasi 				
32.	Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan, WBP dan Anak	Terselenggaranya layanan rehabilitasi narkotika bagi Tahanan, Narapidana dan Anak	100	100	100	100
KEPALA DIVISI KEIMIGRASIAN						
33.	Pelayanan Paspur Simpatik	Meningkatnya jumlah permohonan paspor yang terlayani di luar hari kerja Satuan Kerja Teknis	95	100	100	100
34.	Penegakan Hukum (Gakkum) Keimigrasian	1. Laporan Intelijen tepat waktu	100	100	100	100
		2. Terlaksananya Pemeriksaan Terhadap Pelanggaran Keimigrasian WNI dan WNA	100	100	100	100
		3. Terlaksananya Sosialisasi Gakkum pada seluruh UPT yang dibawah				

Dalam pelaksanaan setiap kegiatan terdapat beberapa target kinerja yang tidak mendapatkan nilai 100%, hal ini dikarenakan ketidaksesuaian laporan dengan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Adapun kendala yang dialami dalam pelaksanaannya dikarenakan pandemic covid-19 yang membuat beberapa kegiatan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



terkendala dan harus diundur pelaksanaannya sehingga tidak sesuai dengan *action plan* yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penilaian Target Kinerja, diketahui bahwa nilai kumulatif kepala kantor wilayah sebesar 98,75%, kepala divisi administrasi sebesar 100%, kepala divisi pemasyarakatan sebesar 98,6% dan kepala divisi keimigrasian sebesar 99,58%. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai kumulatif Target Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2020 adalah 99,21%. Berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai capaian target kinerja sangat baik dan akan terus ditingkatkan kedepannya dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat yang lebih baik.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran organisasi merupakan tolak ukur yang menunjukkan seberapa besar serapan yang dicapai. Semakin besar persentase capaian kegiatan sebuah organisasi, maka semakin besar realisasi/serapan anggaran dan diharapkan outcome yang dihasilkan juga semakin tinggi.

Berdasarkan sasaran strategis di dalam dokumen Renstra Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024, ditetapkan program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran yang terkait. Pada Tahun 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mempunyai 9 (Sembilan) program sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja.

Dalam implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat Tahun 2020 terdapat 9 program/kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 39.887.753.000 (*Tiga Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Depalan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*), naik sebesar 21,15% atau sebesar Rp. 8.436.199.000 (*Delapan Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dari anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp. 31.451.554.000 (*Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



Adapun program dan alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dijelaskan sebagai berikut:

NO	PROGRAM	DIPA 2020		
		PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM	27.324.565.000,-	26.974.697.308,-	98,72%
2	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	1.419.251.000,-	1.171.546.250,-	82,55%
3	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	826.693.000,-	826.438.990,-	99,97%
4	Program Administrasi Hukum Umum	3.064.000.000,-	3.023.358.830,-	98,67%
5	Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	894.006.000,-	893.673.450,-	99,96%
6	Program Pembentukan Hukum	164.548.000,-	164.338.700,-	99,87%
7	Program Pemajuan HAM	263.206.000,-	261.444.750,-	99,33%
8	Program Pembentukan Hukum Nasional	5.865.190.000,-	5.838.481.930,-	99,54%
9	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM	66.294.000,-	66.111.000,-	99,72%

**data per tanggal 31 Desember 2020*

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat Tahun 2020 sangat baik. Serapan anggaran yang tinggi tentu dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti perencanaan anggaran agar secara efektif dan efisien, kerjasama setiap SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai *goals* (sasaran) dan komitmen organisasi untuk bersama-sama memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Hal ini menggambarkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi RI.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat mendapatkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2020 sebesar Rp. 39.887.753.000. Dengan anggaran yang cukup besar maka diharapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga rencana strategis yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dapat dicapai seperti yang diharapkan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan di dalam dokumen rencana kerja diharapkan dapat berjalan dengan baik, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa program kegiatan yang tidak dapat terlaksana dengan baik dan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, adapun hambatan yang dialami adalah sebagai berikut ;

1. Dampak pandemic corona virus (covid-19).
2. Kurangnya program/kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
3. Sarana dan prasarana kerja yang belum memadai dalam pelaksanaan tugas.
4. Wilayah kerja yang cukup luas membuat sulitnya pengawasan.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diperlukan tindak lanjut terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat agar terpenuhinya capaian kinerja yang diharapkan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah tindak lanjut yang akan diambil adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menyesuaikan dengan Surat Edaran Menkumham serta pelayanan publik yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



2. Membuat kegiatan *capacity building* dan mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan/program pelatihan, diklat atau seminar yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi baik yang diadakan oleh pihak interla (BPSDM) ataupun kerjasama dengan pihak eksternal.
3. Meningkatkan alokasi anggaran yang tepat sasaran dalam rangka memenuhi sarana prasaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Pembagian zona wilayah ke dalam 5 wilayah yang diampu oleh tim yang dipilih berdasarkan kompetensinya dan dipimpin oleh Pimpinan Tinggi Pratama dalam melakukan pengawasan.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH JAWA BARAT**

Jalan Jakarta No. 27, Bandung – 40272
Telepon/Faksimili : 022 – 7272185 / 022 – 7219173



LAMPIRAN